

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
PATTIROANG KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA
PADA TAHUN 2017**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ARMAN
10400114333

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARMAN

Nim : 10400114333

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Program : S1

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa Pattioang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
Pada Tahun 2017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan anggota penguji.

Makassar, 13 Agustus 2018

Yang menyatakan,

ARMAN

Nim: 10400114333

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017**" yang disusun oleh **Arman**, NIM: 10400114333, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 13 Agustus 2018

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Pembimbing I : Dr. Jumadi, S.H., M.H.
Pembimbing II : Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H.
Munaqisy I : Dr. Andi Syafriani, S.H., M.H.
Munaqisy II : Dr. Hj. Halimah B, M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt., Tuhan semesta alam yang menciptakan segala makhluk di muka bumi ini dengan penuh kebijaksanaan dan kasih sayang, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017”** dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membuka pintu keimanan dan membawa cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Hamsin** dan Ibunda **Sanang** dan untuk Kedua adikku, terima kasih atas dukungannya, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan tiada henti kepada penulis mulai dari awal perjuangan menempuh kerasnya kehidupan sebagai mahasiswa dan pada semua pihak yang dengan ikhlas memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.**, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga **Prof. Dr. Mardan, M.Ag.**, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan **Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.**, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan **Prof. Dr. Siti Aisyah M.A., Ph.D.**, dan Wakil Rektor Bidang

Kerjasama Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., beserta seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar.

2. **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Ibu **Istiqamah S.H., M.H** dan bapak **Rahman Syamsuddin.,S.H., M.H** selaku ketua Jurusan dan sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar
4. Bapak **Dr. Jumadi, S.H, M.H** dan bapak **Ashabul Kahpi, S.Ag, M.H** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah mendidik dan mentransfer ilmunya kepada penulis serta membantu penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
6. Kepala Desa Pattiroang (Galla Bantalang) beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti serta kepada masyarakat desa yang bersedia menjadi informan selama penulis meneliti di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
7. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan moril maupun materil terhadap penulis.
8. Kepada teman-teman Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) Komisariat UIN Alauddin Makassar dan teman-teman Ikatan Alumni SMA Negeri 13 Bulukumba (IKASMANTIB) yang senantiasa mensupport dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kepada Saudara(i) saya KKN 57 Desa Pasang **M. Makbul, Rasdiana Jusman, Yusfa Lestari, Hildayanti, Riska Nurmayanti** dan **Hasruni** yang bersedia menjadi motivator selama penulis menyusun skripsi.

10. Terkhusus kepada saudara-saudara seataap selama kurang lebih 3 Tahun **Firman, Hariandi, Herman, Ari Purnama, Aswandi, S.Sos, Hardin, Cengho** dan **Azman** yang selalu membantu penulis mulai dalam proses perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsi.
11. Kepada Kakanda **Nasrun Lamu, S.Pt** yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat mengenal dan menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
12. Kepada Kakanda **Rahman, S.H, Marlin, S.IP,** dan **Amin Rais, S.H** yang telah membantu penulis, mulai dari masa pendaftaran mahasiswa baru sampai pada proses penyelesaian studi.
13. Dan kepada seluruh elemen terkait yang peneliti tidak dapat sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala dukungannya selama proses penyusunan penelitian ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. Kami memohon dan berserah diri semoga melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 13 Agustus 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
ARMAN
NIM.10400114333

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pemerintahan Desa.....	13
B. Sekilas Tentang Kebijakan.....	14
C. Alokasi Dana Desa	19
D. Dasar Hukum Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)	21
E. Penyaluran, Pencairan dan Tujuan Alokasi Dana Desa	23
F. Tinjauan Tentang Persepsi	27
G. Rembuk Desa Penggunaan Alokasi Dana Desa	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber data	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen penelitian.....	36
F. Pengolahan Data dan Analisis Data	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37

BAB IV PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PATTIROANG KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PADA TAHUN 2017

A. Gambaran Umum Desa Pattiroang.....	39
B. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017.....	48
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Pada Tahun 2017.....	52
D. Analisis Hasil Penelitian.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. *Vocal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

D. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-Fāḍilah*

النَّجْمَةُ : *al-ḥikmah*

ABSTRAK

Nama : Arman

NIM : 10400114333

**Judul : Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang
Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017**

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana efektifitas pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2017. Kemudian yang kedua adalah tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2017.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-sosiologis yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa sampel seperti Kepala Desa, beserta beberapa anggota masyarakat Desa Pattiroang. Kemudian metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017 sebenarnya sudah berjalan namun belum efektif, karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan keuangan Desa Pasal 22. Kemudian berdasarkan persepsi masyarakat tingkat pengetahuan dan keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa masih sangat rendah sehingga pelaksanaan alokasi dana desa tersebut masih kurang efektif.

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan pemerintah Desa Pattiroang memperbaiki sistem pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pemerintah dan masyarakat desa diharapkan dapat bersinergi dalam pelaksanaan ADD sehingga terciptanya pembangunan yang sesuai harapan masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara dibangun dari desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Inilah yang menjadi cikal bakal sebuah negara bernama Indonesia ini. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan.

Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit.¹ Pemerintah desa melalui hak otonominya memiliki tugas dan tanggung jawab pada pembangunan. Konsep pembangunan didasari atas pertumbuhan ekonomi.²

Pembangunan yang sentralistik telah menyebabkan disparitas ekonomi antara perkotaan dengan pedesaan, yang kemudian membuat perbedaan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan dari berbagai sudut pandang. Maka dari itu diperlukan langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan

¹<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurut-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/>, diakses pada tanggal 23 September 2017 pada pukul 22.49 Wita

²Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: CIDES, 1996), h. 135.

kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik daerah masing-masing.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kapada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Pemahaman akan pembangunan desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari setiap kalangan, mulai dari rakyat biasa hingga segenap aparat di semua lini birokrasi. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pembangunan desa yang merupakan tempat sebagian besar masyarakat miskin yang ada di Indonesia berada adalah untuk memajukan, memandirikan dan mensejahterakan masyarakat, hal ini tentu bukanlah merupakan sesuatu yang mudah untuk dilalui tanpa proses yang sudah sangat matang dan tertata rapi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 dijelaskan mengenai pembangunan Desa yaitu meliputi; (1) Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; (3) Pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30 persen untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa sumber pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.³

Dalam proses pengambilan tindakan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa baik itu pada saat pengambilan keputusan, implementasi pemanfaatan dan evaluasi program pembangunan, identifikasi masalah, serta proses perencanaan program pembangunan, harus bisa di pertanggung jawabkan secara penuh, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa di dalam meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah. Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang menitik beratkan pendekatan pembangunan manusia erat kaitannya dengan pembangunan

³Dikutip dari “Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

sebagai sistem, metode dan gerakan dalam rangka pertumbuhan sosial.

Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:⁴

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
- d. Kabupaten/Kota; dan
- e. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah.

Sejalan dengan potensi yang terkandung dalam desa, pemerintah Indonesia mempunyai komitmen dalam melakukan pembangunan yang berkonsep dari bawah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang ini didasari bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju

⁴Lihat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18.

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Salah satu poin yang dianggap menjadi momentum adalah adanya pernyataan dalam Pasal 72, bahwa desa akan memperoleh alokasi dana desa sebesar 1 Miliar yang bersumber dari APBN. Hal ini menjadi peluang besar bagi desa untuk menunjukan dan melibatkan dirinya dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia. Banyak hal yang kemudian bisa dibangun dengan turunya dana tersebut, diantaranya dari aspek infrastruktur, kesehatan, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, disisi lain dengan turunya dana desa sebesar 1 Miliar tersebut juga menyita perhatian lebih dan pertanyaan dari banyak pihak. Diantaranya terkait kemampuan desa dalam mengatur pengalokasian dana kekhawatiran akan terjadinya korupsi tingkat bawah dalam tataran pemerintah desa, dan efektifitas dalam proses pembangunan desa. Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud: (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari

kebijakan. (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. Terlebih dalam UU No.06 Tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 4, bahwa tujuan dari adanya UU tersebut diantaranya adalah untuk membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.⁵

Dikutip dari tribun-timur.com Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengalokasikan Rp167,4 Miliar untuk 109 desa di Bulukumba pada tahun 2017. Jumlah dana itu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp76,5 miliar, Bantuan Dana Desa (BDD) sebesar Rp86,9 miliar serta Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp3,9 miliar. Beberapa desa diantaranya mendapat dana yang lebih besar dari yang lainnya yakni Desa Pattiroang di Kecamatan Kajang yang merupakan desa penerima terbesar yang mencapai Rp1,6 Miliar. Sementara, Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro penerima dana desa terkecil sebesar Rp 1,4 Miliar. Secara keseluruhan rata-rata desa menerima anggaran desa sebesar Rp1,5 Miliar. Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto menyampaikan, anggaran dana yang cukup besar itu diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa.⁶

Dana tersebut dimaksudkan untuk pembangunan masyarakat desa. Dewasa ini telah banyak para ahli pembangunan masyarakat pedesaan yang mengangkat

⁵M. Ali Mahmudin, “*Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa*” (*Studi Pustaka* (KPM 403) Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2016), h. 2.

⁶<http://makassar.tribunnews.com/2017/01/18/109-desa-di-bulukumba-dapat-dana-rp1674-miliar>, diakses pada tanggal, 23 September 2017 pada pukul 23.21 Wita

permasalahan ini kepermukaan. Karena sesungguhnya yang terjadi petani tetap miskin, sebab persoalan yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas sumber daya manusia, modal dan kebijakan tetap sama dari tahun ketahun walaupun bentuknya berbeda.⁷

Sebagaimana tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan. Maksud dari urusan pemerintahan yaitu antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Kemudian tugas Kepala Desa dalam hal pembangunan yaitu antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum. Sedangkan tugas kemasyarakatan Kepala Desa yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial-budaya masyarakat.

Dalam penggunaan dana desa pemerintah dalam hal ini Kepala Desa dan jajarannya diharapkan sebijak mungkin dalam pengalokasian dana desa tersebut. Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Bulukumba No. 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Pangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 pasal 6 yang berbunyi⁸:

- a. penggunaan ADD dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang berkenaan;

⁷Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar :Alauddin University Press, 2014), h. 74.

⁸Lihat Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 pasal 6

- b. pengelolaan ADD dilakukan PTPKD;
- c. pengadaan barang/jasa Desa dilaksanakan oleh TPK;
- c. kegiatan yang didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan dalam belanja APB Desa;
- e. perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APB Desa dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. guna kepentingan pengawasan maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan sesuai dengan peraturan APB Desa.

Dari beberapa uraian di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017. Sebagaimana dalam amanat Undan-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini peneliti harus tahu bagaimana pemerintah desa mengelola ADD, apakah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan ataukah juga sudah sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan. Olehnya iu, sasaran peneliti yaitu mendapatkan informasi dari elemen yang terkait seperti pemerintah desa dan masyarakat desa Pattiroang pada khususnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka pokok yang dibahas adalah bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017. Pokok masalah tersebut dijabar sebagai sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Pattiroang kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba pada tahun 2017 ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Pattiroang kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba pada tahun 2017 ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dari beberapa benelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Skripsi Nova Sulastri, Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, Universitas Halu Oleo Kendari. Skripsi ini membahas tentang Konsep dan Ukuran Efektivitas, Pengertian Pengelolaan, Pengertian Desa,

Pembangunan Desa dan Efektivitas Pengalokasian Dana Desa. Dalam Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis terfokus pada pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

2. Haw Widjaja, Dalam bukunya penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam Buku ini membahas secara rinci Pemerintahan Desa. Namun buku ini tidak membahas secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan Alokasi Desa.
3. Subarsono, dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik. Dalam buku ini membahas sekilas tentang Kebijakan. Tapi jika dibandingkan dengan skripsi penulis, buku ini tidak membahas secara khusus tentang pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa.
4. Skripsi Risma Hafid, Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016, Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan, Dana Desa, Pembangunan. Dalam skripsi ini secara spesifik skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis terfokus pada pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan menyimpan dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Pattiroang kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba pada tahun 2017.

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa Pattiroang kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba pada tahun 2017?

Selain tujuan diatas, Penulis berharap hasil penelitian ini juga memiliki manfaat, adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai sarana untuk menambah keilmuan dan intelektualitas penulis dan para pembaca serta sebagai informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa sebenarnya serta semua kalangan dapat berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa sehingga dapat tercipta pemerintahan desa yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.⁹

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul atau hak dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

⁹HAW Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah* (Jakarta : Graha Ilmu, 2003), h. 03.

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut Elli M Setiadi dan Usman Kolip, para ahli sosiologi lebih memusatkan perhatiannya pada masyarakat desa “sebagai unit sosial” yaitu sekelompok manusia yang hidup bermukim secara menetap dalam wilayah tertentu yang tidak selalu sama dengan wilayah administrasi setempat dan mencakup tanah pertanian yang kadang-kadang dikuasai bersama.

Menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, beberapa rincian umum desa yang universal sifatnya:

- 1) Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
- 2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.
- 3) Karenanya faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat.
- 4) Tidak seperti di kota sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dirinya sendiri”.
- 5) Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan
- 6) Desa mempunyai ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada di kota.¹⁰

B. Sekilas Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Secara etimologi kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis

¹⁰Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 49.

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Menurut Budiardjo kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Thomas Dye, kebijakan public adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).¹¹

2. Jenis-Jenis Kebijakan

Secara tradisional pakar ilmu politik mengategorikan kebijakan public kedalam kategori : (a) kebijakan substansif (misalnya : kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak-hak sipil, masalah luar negeri dan sebagainya); (b) kelembagaan (misalnya : kebijakan legislatif, kebijakan yudikatif dan kebijakan department); (c) kebijakan menurut kurun waktu tertentu (misalnya : kebijakan masa Reformasi, kebijakan masa Orde Baru dan kebijakan masa Orde Lama). Kategori lain tentang kebijakan dibuat oleh James Anderson sebagai berikut :

- a) kebijakan substansif vs kebijakan procedural. Kebijakan substansif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kebijakan Raskin (beras untuk orang miskin). Sedangkan kebijakan procedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan. Misalnya kebijakan yang berisi kriteria orang disebut miskin dan sebagaimana prosedur untuk memperoleh raskin.
- b) kebijakan distributive vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu atau individu. Sebagai contoh : kebijakan subsidi BBM dan kebijakan obat generik. Kebijakan regulatori

¹¹Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2005), h. 2.

adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Misalnya kebijakan ijin mendirikan bangunan (IMB), kebijakan pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh kebijakan pajak progresif, kebijakan asuransi kesehatan gratis bagi orang miskin.

- c) kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kongkrit pada kelompok sasaran. Misalnya kebijakan raskin. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d) kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik.¹²

3. Peraturan Kebijakan

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies Ermessen*. Secara bahasa *freies Ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas, lepas, tidak terikat dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Jadi *freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freies Ermessen* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan

¹²Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2005), h. 19-21.

administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.¹³

Ciri utama dari kebijakan publik adalah bahwa kebijakan itu bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh David Easton yang mengatakan kebijakan publik dirumuskan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam sistem politik.

Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi Negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti beleidslijnen (garis-garis kebijakan), het beleid (kebijakan), voorschriften (peraturan-peraturan), richtlijnen (pedoman-pedoman), regelingen (petunjuk-petunjuk) circulaire (surat edaran), resoluties (resolusi-resolusi) dan sebagainya. Menurut Philipus M. Hadjon, pada hakikatnya peraturan kebijakan merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schriftelijk beleid” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hokum bayangan dari undang-undang atau hokum. Oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu) atau *spiegelsrecht* (hokum bayangan atau cermin).¹⁴

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut Webster’s yang berasal dari bahasa Latin

¹³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 169.

¹⁴Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, h. 174-175.

“implementum” dari kata *“impere”* dan *“plere”*. Kata *“implere”* dimaksudkan *“to fill up”, to fill in*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *“plere”* maksudnya *“to full”* yaitu mengisi. Selanjutnya kata *“to implement”* mengandung tiga arti sebagai : (1). Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2). Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Kemudian, Tachjan mengatakan implementasi kebijakan publik *“merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui”*. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi.¹⁵

Metter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.¹⁶

Menurut Grindle implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,

¹⁵Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung : Penerbit AIPI Bandung, 2003), h. 64.

¹⁶Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Evaluasi* (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003), h. 169-170.

karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.¹⁷

Mazmanian dan Sebatier mengklafisikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. *Pertama*, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. *Kedua*, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

C. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD

¹⁷Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis* (Jakarta : Intermedia, 1994), h. 66.

Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).¹⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.²⁰

Melalui alokasi dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu mempercepat pembangunan. Kebijakan ADD yang dititikberatkan pada pembangunan masyarakat pedesaan diharapkan juga mampu

¹⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa* Pada Pasal 18.

¹⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat (1), h. 29.

²⁰Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4).

mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten.²¹

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

D. Dasar Hukum Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.²²

Mendesentralisasikan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik dan masyarakat lokal dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah.²³

²¹Syamsul Bahri, *Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna* (Skripsi, Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari Tahun 2017), h.13.

²²Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 176.

²³Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, h. 178.

Dalam kaitannya dengan topic pembahasan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa bagian kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
3. PP No. 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 68 tentang sumber pendapatan desa yang terdiri dari :²⁴
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan untuk Desa.
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang

²⁴Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 68.

pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.

- d. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
5. Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1 dan 2), Pasal 3 ayat (3) ayat (4) butir (a dan b) ayat (5), Pasal 9 ayat (6 dan 7).
 6. Peraturan Bupati Bulukumba No. 06 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besararan Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017.

E. Penyaluran, Pencairan dan Tujuan Alokasi Dana Desa

1. Umum

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa
- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c.q Kepala bagian pemerintahan Desa Setda kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan

- d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten
- e. Kepala bagian Setda akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa.²⁵

2. Cara pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa

- a. Tim pelaksana desa akan melaksanakan Kegiatan Rencana Pembangunan Desa (RPD) dengan ketentuan:
 - 1) Permohonan penyaluran tahap I (30%) pada triwulan kedua, dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan dan photocopy rekening kas pemerintah desa.
 - 2) Penyaluran permohonan tahap II (40%) pada triwulan ketiga dan tahap III pada triwulan keempat, dilampiri laporan perkembangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebelumnya.
- b. Tim pelaksana Desa mengirimkan RPD dimaksud pada tim pendamping kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian sesuai pengajuan anggaran dengan APDesa(berkas pengajuan RPD) yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan untuk diperbaiki.
- c. Selanjutnya Camat mengirimkan berkas pengajuan Rencana Pembangunan Desa (telah diverifikasin oleh tim pendamping kecamatan) kebagian pemerintah Desa guna pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

²⁵M. Arif SIP, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa* (RedPost: Pekanbaru-Riau, 2007), h. 56.

- d. Kepala Bagian Pemerintahan Setda atas dasar pengajuan RPD dari kecamatan, mengajukan SPP kepada Kepala Bagian Keuangan Setda kabupaten/kota.
- e. Kepala Bagian Keuangan Setda menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah rekening Pemerintah Desa dimasing-masing Bank yang ditunjuk.
- f. Pencairan dana dimasing-masing Bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp 6000,- dari Kepala Desa.
- g. Tim pelaksana desa bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa.²⁶

3. Tujuan ADD

Salah satu tujuan dari ADD adalah pembangunan masyarakat pedesaan dan mengatasi masalah kemiskinan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.²⁷ Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, bahkan terkadang dalam menjelaskan masalah penyebabnya dapat membingungkan dan cenderung berputar-putar. Berbagai pendekatan telah banyak dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi angka kemiskinan diantaranya pendekatan kebutuhan dasar dengan memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

²⁶M. Arif SIP, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, h. 58.

²⁷Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), h. 3.

memenuhi kebutuhan pangan dan bukan pangan diukur dari sisi pengeluaran yang disebut garis kemiskinan.²⁸

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017 pasal 2, maksud dan tujuan ADD adalah:²⁹

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan desa;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kemudian tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah : 1)

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 4) Meningkatkan

²⁸Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, h. 81.

²⁹Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Tahun Anggaran 2017, Pasal 2

pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosil budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melaui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

F. Tinjauan Tentang Persepsi

Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu mengorgansasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi arti pada lingkungan mereka. Bagaimana segala sesuatu tersebut mempengaruhi persepsi seseorang, nantinya akan mempengaruhi pula perilaku yang akan dipilihnya. Menurut Tjahya Supritna, istilah lain dari persepsi adalah suatu proses seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Sedangkan menurut Luthans, persepsi itu adalah lebih kompleks dan lebih luas kalau dibandingkan dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan dan penafsiran. Walaupun persepsi sangat tergantung pada penginderaan data, proses kongnitif barangkali bisa menyaring, menyederhanakan atau mengubah secara sempurna data tersebut.

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan istilah yang memiliki pengertian yang berhubungan dengan pandangan atau daya yang menanggapi, memahami apa yang ada di sekeliling individu. Dengan kata lain persepsi adalah cara seseorang memandang atau menanggapi suatu obyek atau peristiwa yang ada disekitarnya dengan menyimpulkan informasi yang sampai kepadanya. Persepsi merupakan suatu penilaian sebagai persiapan perilaku

kongkrit dan nilai-nilai itu dengan melalui emosi, motivasi dan ekspektasi akan mempengaruhi persepsi, nilai-nilai yang berbeda juga mempengaruhi persepsi perilaku tersebut.

Persepsi timbul karena adanya dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya tergantung pada proses pemahaman terhadap sesuatu termasuk didalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Sedangkan faktor-faktor eksternalnya adalah menurut Adam I. Indrawijaya antara lain:

- 1) Faktor lingkungan, yang secara sempit menyangkut warna, bunyi, sinar dan secara luas dapat menyangkut faktor ekonomi, sosial dan politik.
- 2) Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dan segala tindakannya. Seseorang yang mempunyai konsepsi, pendapat dan teori bahwa manusia pada dasarnya baik, cenderung menerima semua rangsangan sebagai suatu yang baik atau paling tidak sebagai sesuatu yang bermanfaat dan sebaliknya.
- 3) Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri. Seseorang mungkin saja beranggapan bahwa dirinyalah yang terbaik sedang orang selalu kurang baik atau sebaliknya.
- 4) Faktor yang hubungan dengan motif dan tujuan seseorang untuk menafsirkan suatu rangsangan.
- 5) Faktor pengalaman masa lampau, pengalaman dan latar belakang kehidupan seseorang pada waktu kecil dan menentukan kepribadiannya dan mempengaruhi perilakunya.³⁰

³⁰ Samsul Bahari, "Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2017), h. 17-19.

G. Rembuk Desa Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Jika kita perhatikan dari semua penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) haruslah melibatkan masyarakat, dalam hal tersebut adalah :

1. Musyawarah

Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam islam ialah tata aturan parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat islam ini menegakkan prinsip-prinsip syura. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk mengikuti prinsip ini. Nash yang pertama menyuruh rasul bermusyawarah. Kalau demikian kita para umat lebih patut menerima tugas itu, Nas yang kedua menerangkan bahwa sifat para mukmin yaitu melaksanakan sesuatu dengan jalan musyawarah.³¹

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang dikemukakan tentang bai'at. Ia menghendaki tentang musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya menimba atau meminta pertimbangan dari ulama, tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis. Hanya saja ada batasan yang melingkari berlakunya musyawarah atau konsultasi secara wajar.³² Demikian halnya dengan Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba jika dilihat dari cara pengelolaannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya harus dilaksanakan dengan

³¹Ash shiddeqy, dkk, *Islam dan Politik* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), h. 168.

³²Ash shiddeqy, dkk, *Islam dan Politik*, h. 101-102.

melibatkan unsur masyarakat yang ada, maka salah satu cara untuk melibatkan masyarakat tersebut adalah dengan cara musyawarah.

Praktek musyawarah dan tukar menukar pendapat pada masa Arab pra Islam sebagaimana terbukti dalam rujukan-rujukan bahasa Arab kepada pertemuan-pertemuan berbagai badan ada yang disebut majlis dan ada pula yang disebut mala, seperti juga yang ditemukan dalam inskripsi-inskripsi kuno di Arabi Selatan.³³

Konsep Ibnu Taimiyah tentang musyawarah atau konsultasi sama luasnya dengan konsep yang dikemukakannya tentang bai'at, ia menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya meminta (meminta) pertimbangan dari ulama, tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan suatu pendapat yang dinamis. Hanya saja ada batasan yang melingkari berlakunya musyawarah atau konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan materi musyawarah/konsultasi. Misalnya ajaran-ajaran Islam pokok yang merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan.³⁴

Adapun didalam Alquran Allah SWT berfirman dalam QS. Asl-Syura 42/38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

³³Ihsan Ali-Fauzi, *Bahasa Politik Islam* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 194.

³⁴Ta'yudin Ahmad, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 101-102.

Terjemahannya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Asy-Syura 42/38)³⁵

Secara tegas digaris bawah oleh Alquran bahwa segala persoalan kemasyarakatan kaum muslimin diputuskan dengan musyawarah diantara mereka untuk untuk mencapai mufakat. (Tafsir QS. Asl-Syura 42/38)³⁶

Ayat tersebut diatas termasuk dalam kelompok ayat makkiyah. Bahwa berarti ummat islam telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Madinah bahkan sebelum islang datang.³⁷ Sebab turunnya ayat tersebut menurut pendapat para muassirin adalah karena masalah khusus yaitu untuk memuji perjalanan kaum Anshar yang mengikuti sunnah melakukan syura. Hukum yang dapat diambil bersifat umum, meliputi seluruh umat, bentuknya seperti ayat-ayat lain.



2. Gotong royong

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah 5/2

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia Alquran dan Terjemahan (CV Penerbit J-Art, 2004), h. 487

³⁶Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Perang Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), h. 305

³⁷Ali Nurdin, *Quranic Society*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 230.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Terjemahanya :

Dan bertolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sungguh Allah sangat berat siksanya. (QS. Al-Maidah 5/2)³⁸

Salah satu ciri khas yang menonjol dalam ajaran islam adalah kebersamaan dalam mencapai kebijakan. Rasulullah juga mengajarkan bahwa “karunia Tuhan tercurah bagi mereka yang bekerja sama, sedang serigala hanya menerkam domba yang berjalan sendiri (Tafsir QS. Al-Maidah 5/2)³⁹

Ayat ini menyatakan bahwa tolong-menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karna tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.⁴⁰

Dengan demikian Negara masyarakat atau Negara mustahil dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa ada uluran bantuan dari masyarakat dan dari Negara lain. Disinilah arti penting dan relevansi tolong menolong yang termuat dalam piagam Madinah dan diajarkan islam untuk masyarakat manapun, sebaliknya ayat tersebut sebagaimana Piagam Madinah melarang kerja sama dan tolong menolong dalam berbuat dosa.

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (CV Penerbit J-Art, 2004), h. 106

³⁹Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Perang Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), h. 305

⁴⁰J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 195.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dengan unit analisisnya adalah pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD). Penentuan lokasi penelitian ini dimaksud untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan dan sekaligus mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi kebijakan yang akan diamati. Dipilihnya Desa Pattiroang sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan:

- a) Bentuk pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa ini menurut penulis masih kurang efektif.
- b) Di lokasi tersebut memungkinkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan karena lokasi tersebut mudah dijangkau dan sekaligus merupakan tempat tinggal penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifiknya pada penelitian ini adalah penelitian lapangan

Adapun pendekatan normatif-sosiologis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017. Melihat fakta yang ada dilapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.⁴¹

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, letiratur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan primer, bahkan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan:
 - a. Bahan hukum primer, berupa undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku, artikel ilmiah dan lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain adalah menggunakan metode - metode sebagai berikut:

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana, 2015), h. 93.

1. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu dokumen Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris serta 4 Orang tokoh masyarakat Desa Pattiroang.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Instrumen penelitian bermanfaat untuk memperoleh kesimpulan yang benar dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

2. Handphone

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara.

3. Alat Tulis

Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data - data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dan penelitian ini adalah:

- a. *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan pada data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. *Koding* data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok permasalahan dengan cara memberi kode tertentu pada tiap data tersebut.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan atau mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku ilmiah yang berhubungan dengan topik yang akan teliti mengenai Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi *Credibility* (validasi internal), *Transferability* (validasi eksternal), *Dependability* (reabilitas), dan *Confirmability* (obyektivitas).

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:⁴²

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara.

2. Pengujian *Transferability*

Pengujian *Transferability* merupakan validasi eksternal, digunakan agar hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rinci dan sistematis.

3. Pengujian *Defendability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *defendability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian

4. Pengujian *Confirmability*

⁴²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.37

Dalam penelitian ini uji *confirmability* dilakukan bersamaan dengan uji *defendability*, kerana pengujian ini harus melibatkan orang lain.



BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA PATTIROANG KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PADA TAHUN 2017

A. Gambaran Umum Desa Pattiroang

1. Kondisi Geografis

Desa Pattiroang merupakan salah satu desa yang terletak dalam kawasan adat Amma Towa Kajang. Desa ini berada di sebelah utara dalam wilayah Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Pattiroang merupakan desa yang dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah mulai dari hutan adatnya, perkebunan, sawah dan kekayaan alam lainnya.

Secara geografis Wilayah Desa Pattiroang berada pada daerah perbukitan dan bergelombang. Jika dilihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Pattiroang sekitar 50-200 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 13-29 °C dengan kelembaban udara 70% pertahun. Luas wilayah Desa Pattiroang secara keseluruhan tercatat 602,68 ha, yang terbagi atas beberapa peruntukan seperti untuk luas pemukiman 27,93 ha, untuk persawahan 55,03 ha, perkebunan 234 ha dengan rincian (kebun cengkeh 72,53 ha, karet 110,08 ha dan merica 51,39 ha), tegal/ 134 ha, tagalan 64,25 ha, jalan desa 12,202 ha, jalan kabupaten 7,606 ha dan luas hutan 67,39 ha.⁴³

Secara administrasi Desa Pattiroang berbatasan desa-desa tetangga yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Batulohe
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Batunilamung

⁴³Arsip Desa Pattiroang di Kantor Desa Pattiroang

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanah Towa
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sapanang

Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintah kecamatan Kajang dengan lokasi pemukiman warga masyarakat desa Pattiroang kurang lebih 38 km, sedangkan dari ibu kota Kabupaten Bulukumba jaraknya sekitar 66 km dan 237 km dari kota Makassar. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintah Desa Pattiroang sudah beraspal sepanjang 5 km dari jalan raya poros Tanete-Tanah Jaya, hal ini dapat memudahkan bagi bagi warga masyarakat Desa Pattiroang.⁴⁴

2. Kondisi Demografis

a. Penduduk

Menurut data yang diperoleh, jumlah penduduk Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sebesar 2.209 Jiwa dengan rincian

Laki-laki : 1.088 jiwa

Perempuan : 1.121 Jiwa

Kepala Keluarga : 565 KK

Desa tersebut dihuni oleh sekitar 2.209 Jiwa yang terdiri dari 1.088 jiwa laki-laki dan perempuan 1.121 Jiwa dari 565 kepala keluarga. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari jumlah yang berjenis kelamin perempuan dengan selisih 132 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut ini:

⁴⁴Ahmad, Kepala Desa Pattiroang, *Wawancara*, di Desa Pattiroang, 25 November 2017, pukul 09.45-10.30 WITA.

**Tabel I. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa
Pattiroang Tahun 2017**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.088 jiwa
2	Wanita	1.121 jiwa
3	Jumlah keseluruhan	2.209 jiwa

Sumber: Profil Desa Pattiroang Tahun 2017.⁴⁵

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan masyarakat atau penduduk Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba sebanyak 2.209 jiwa pada tahun 2017.

Dari hasil survei data sekunder dibandingkan dengan data yang ada di administrasi desa tersapat kurang lebih 100 jiwa yang tidak tercatat dalam administrasi desa. Hal ini mendorong pemerintah desa untuk memperbaiki sistem administrasinya dan melakukan cek ulang terhadap penyebab terjadinya selisih data penduduk tersebut.

Sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya selisih tersebut adalah:

- 1) Banyak yang mencari nafkah di luar desa
- 2) Banyak Warga Desa Pattiroang yang merantau keluar negeri
- 3) Banyak warga yang sudah pindah domisili dikarenakan:
 - a) Perkawinan keluar desa

⁴⁵Arsip Kependudukan di Kantor Desa Pattiroang Pattiroang Pada Tahun 2017.

- b) Pindah rumah karena pekerjaan dan tugas
- c) Banyak penduduk sudah meninggal dunia namun masih tercatat dan lain-lain.
- d) Mata Pencanharian

Desa Pattiroang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.209 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah bermata pencaharian petani atau boleh dikatakan hampir semuanya petani. Dari jumlah penduduk Desa Pattiroang sebanyak 2.209 jiwa hanya sekitar 725 orang yang bekerja yang bekerja secara aktual dan selebihnya adalah tidak bekerja.

Berikut adalah bentuk tabel mengenai jumlah penduduk Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menurut mata pencaharian.

**Tabel II. Jumlah Penduduk Desa Pattiroang Kecamatan
Kajang Kabupaten Bulukumba Menurut Mata Pencaharian**

Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Persentase (%)
Petani	421 Orang	0 Orang	58%
Pedagang Barang Kelontong	0 Orang	13 Orang	1,8%
Tukang Kayu	5 Orang	0 Orang	0,6%
Tukang Batu	17 Orang	0 Orang	2,3%
Tidak mempunyai perkerjaan tetap	59 Orang	105 Orang	22,6%
PNS	1 Orang	1 Orang	0,2%

Sopir	8 Orang	0 Orang	1,1%
Dukun Tradisional	3 Orang	4 Orang	1%
Tukang Listrik	1 Orang	0 Orang	0,1%
Peternak	87 Orang	0 Orang	12%
Jumlah	725 Orang		100%

Sumber: Kantor Desa Pattiroang Tahun 2017.⁴⁶

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian penduduk mempunyai mata pencaharian yang telah disebutkan diatas kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan yang urutan kedua adalah oran yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

b. Kondisi Sosial Budaya

Desa Pattiroang merupakan salah satu desa yang masih kental dengan nilai-nilai adat yang wariskan secara turun temurun oleh leluhur masyarakat adat Kajang yang. Salah satu bentuk warisan itu adalah “*Pasang*” yang berarti pesan-pesan, petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan bagaimana seseorang menampakkan diri terhadap makro dan mikro kosmos serta tata cara menjalin harmonisasi alam, manusia dan dengan Tuhannya.⁴⁷

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Pattiroang masih kental dengan nilai-nilai *si pakatu*, *si pakainga*, *si pakalebbi* serta budaya gotong royong yang selalu terpatri dalam jiwa setiap individu masyarakat

⁴⁶ Arsip Kependudukan di Kantor Desa Pattiroang Pada Tahun 2017.

⁴⁷ Aswandi, “Pola Hubungan Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Amma Towa Kajang” (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016), H. 60.

Desa Pattiroang. Hal ini senada dengan penjelasan bapak Amiruddin selaku tokoh masyarakat Desa Pattiroang yang mengatakan bahwa:

“Sekarang masyarakat Desa Pattiroang masih berusaha untuk mempertahankan nilai sosial dan budaya yang diwariskan oleh para pendahulu kami khususnya di Desa Pattiroang, namun kita tidak bisa pungkiri bahwa 5-10 tahun kedepan nilai-nilai budaya itu akan hilang seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang berkembang pesat”⁴⁸

Dari penjelasan bapak Amiruddin diatas terlihat adanya kekhawatiran akan pergeseran nilai yang selama ini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Pattiroang. Dengan perkiraan akan bergesernya nilai atau kondisi sosial yang selama ini mereka pertahankan, menjadi beban tersendiri bagi masyarakat Desa Pattiroang untuk tetap menjaga serta mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada.

c. Kondisi pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal utama pembangun bangsa. Dalam hal ini tingkat pendidikan yang diterima oleh suatu masyarakat yang memiliki pendidikan foramal maupun non formal yang nantinya dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak lebih dinamis. Dibandingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali. Adapun keadaan penduduk Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menurut tingkat pendidikan dilahat pada tabel berikut:

⁴⁸Amiruddin, Tokoh Masyarakat Desa Pattiroang, wawancara, di Desa Pattiroang, 1 Desember 2017 pada Puku 13.00-13.45 WITA.

**Tabel III. Data Pendidikan Masyarakat Desa Pattiroang Kecamatan Kajang
Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak tamat SD	36 Orang	41 Orang
2.	Tamat SD	83 Orang	110 Orang
3.	Tidak tamat SLTP	7 Orang	4 Orang
4.	Tamat SLTP/ sederajat	49 Orang	36 Orang
5.	Tamat SLTA/ sederajat	25 Orang	21 Orang
6.	D-3	2 Orang	4 Orang
7.	S-1	8 Orang	8 Orang
JUMLAH		210 Orang	224 Orang

Sumber: Profil Desa Pattiroang Pada Tahun 2017.⁴⁹

Pada tabel diatas klasifikasi penduduk Desa Pattiroang menurut ijazah yang ditamatkan berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah laki-laki sebanyak 210 orang dan perempuan 224 orang. Adapun jumlah masyarakat dari kalangan laki-laki yang berhasil memperoleh ijazah SD/Sederajat sebanyak 83 orang sedangkan perempuan sebanyak 110 orang; Selanjutnya yang berhasil memperoleh ijazah SLTP/Sederajat laki-laki sebanyak 49 orang dan perempuan 36 orang; Yang memperoleh ijazah SLTA/Sederajat laki-laki sebanyak 25 oran dan perempuan 21 orang; yang memperoleh ijazah D-3/Sederajat, laki-laki sebanyak 2 orang dan

⁴⁹Data kependudukan Desa Pattiroang 2017

perempuan 4 orang; sedangkan untuk ijazah S-1/Sederajat laki-laki dan perempuan jumlahnya sama yaitu masing-masing 8 orang.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang segala aktivitas kehidupan, baik sarana dan prasarana dibidang sosial maupun dibidang ekonomi. Mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Pattiroang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV. Sarana dan Prasarana Desa Pattiroang

No	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah (unit)
1	Kantor Desa	1
2	Mesjid	2
3	Pustu	1
4	SD	1
5	TK	1
6	Komputer	1
7	Kendaraan Dinas	1

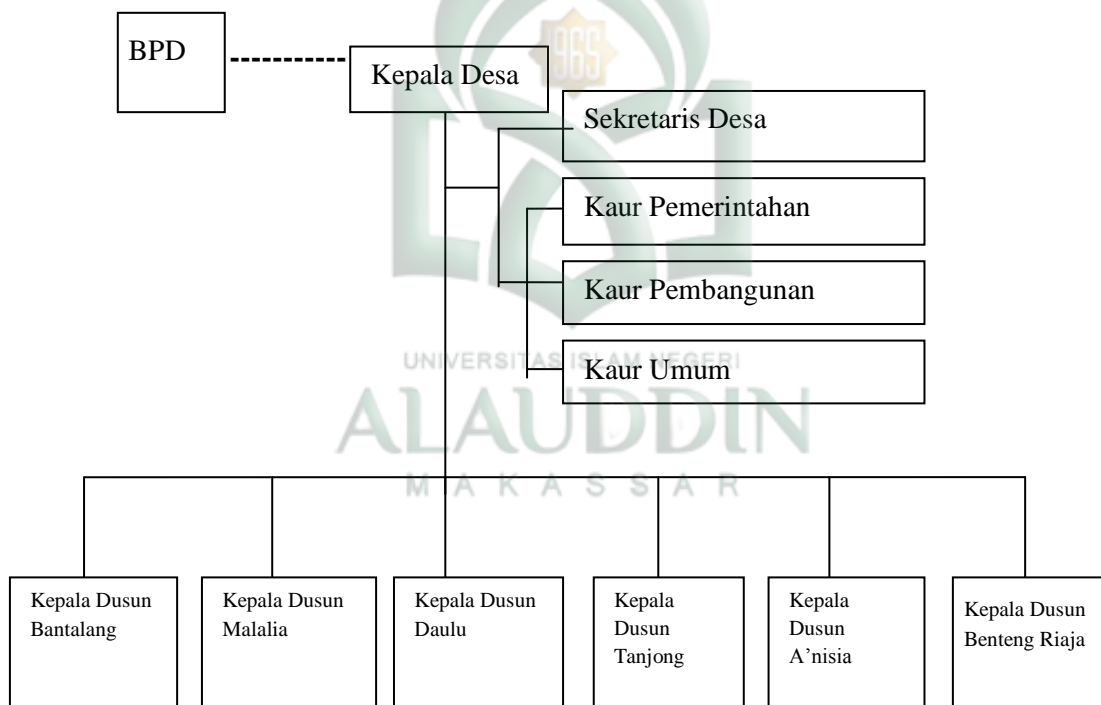
Sumber: Data Desa Pattiroang Tahun 2017

e. Struktur Organisasi Pemerintah Dea

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa

yang dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan. Dari penjelasan diatas, maka struktur organisasi Desa Pattiroang adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Desa
- 2) Unsur pembantu pimpinan yaitu sekretaris
- 3) Unsur pelaksana teknis: kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan dan kepala urusan Umum
- 4) Unsur pelaksana kewilayahan yaitu : kepala dusun yang terdiri dari enam kepala dusun.



B. Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu Desa Pattiroang Kecamatan

Kajang Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2017 dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Namun jika dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn yang mengatakan, yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa ini telah mencapai tujuan?⁵⁰ Nah, berdasarkan pendapat Bapak Syamsuddin selaku tokoh masyarakat

Desa Pattiroang yang mengatakan:

“Sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah desa selama tahun 2017 belum begitu efektif karna jika dilihat dari hasil yang ada, Pemerintah Desa hanya fokus pada pembangunan infrastruktur (pembukaan jalan desa dan renovasi kantor desa) dan kebijakan yang lain kurang diperhatikan, contoh yang paling terlihat adalah yaitu belum adanya Badan Usaha Milik Desa ”⁵¹

Dari pendapat bapak Syamsuddin diatas penulis sendiri berpendapat bahwa sangat jelas jika pelaksanaan kebijakan ADD di Desa tersebut belum begitu efektif. Salah satu indikator bahwa suatu desa dikatakan berhasil mengelola keuangan desa adalah adanya usaha atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Namun di Desa Pattiroang sendiri belum ada yang namanya Badan Usaha Milik Desa. Jika seandainya pemerintah mau menyisipkan sedikit dana desa untuk membangun usaha desa maka dapat dipastikan bahwa Desa tersebut akan lebih maju dari yang sekarang. Kemudian jika dilihat dari data yang ada, terdapat 169 orang masyarakat Desa Pattiroang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.⁵² Dimana dengan tidak adanya pekerjaan tetap bagi mereka sewaktu-waktu akan

⁵⁰Wahyudin, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Ako Kecamatan Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara* (Artikel, Mahasiswa Program Studi Magister Administras Publik Pasca Sarjana Universitas Tadulako), h. 145.

⁵¹Syamsuddin, Tokoh Masyarakat Desa Pattiroang, *Wawancara*, di Desa Pattiroang, 10 Desember 2017, Pukul 15.30 WITA.

⁵²Profil Desa Pattiroang Tahun 2017

kehilangan pekerjaannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa belum dapat mengelola keuangan desa dengan baik karena kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Berikut ini adalah bentuk pelaksanaan keijakan alokasi dana desa di Desa Pattiroang Pada Tahun 2017

Tabel V. Rekapitulasi APBDesa Tahun Anggaran 2017

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persen (%)	Sumber
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Gaji dan tunjangan, Pengadaan operasional perkantoran, operasional BPD, operasional upah pungut, penyusunan RKPDesa, penyusunan LPJ Kepala Desa, penyusunan peraturan Desa, pembangunan/rehabilitasi kantor Desa	711.517.917	42,1	ADD, BHPRD, PADesa, Silpa
Pembangunan Desa	Pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan Desa, pembangunan/rehabiltasi drainase/gorong-gorong	822.339.000	48,7	DD
Pembinaan Masyarakat	Pembinaan keamanan dan ketertiban, PKK, lembaga	69.918.550	4,1	BHPRD, PADesa,

	keagamaan, LPMD, kader posyandu dan PPKBD			Silpa
Pemberdayaan Masyarakat	Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala Desa dan aparat Desa, peningkatan kapasitas masyarakat desa, peningkatan kesehatan masyarakat/panrita siaga aktif	85.588.823	5,06	ADD, DD
Jumlah		1.689.364.299	100	

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017

Tabel diatas menunjukkan jumlah anggaran APBDesa yang diterima oleh Desa Pattiroang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.689.364.299 (satu miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:⁵³

- a. Pendapatan asli Desa Rp 27.831.600
- b. Pendapatan transfer Rp 1.627.223.666
- c. Dana desa (DD) Rp 862.989.000
- d. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 36.500.666
- e. Alokasi desa (ADD) Rp 727.734.000
- f. Silpa Rp 34.309.033

Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Pattiroang pada Tahun 2017 yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 711.517.917 atau

⁵³ Arsip Desa Pattiroang, *Rekapitulasi APBDesa*, Tahun 2017

sekitar 42,1%, pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 822.339.000 atau sekitar 48,7%, pembinaan masyarakat sebesar Rp 69.918.550 atau sekitar 4,1% dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 85.588.832.

Dengan demikian pengalokasian anggaran ADD oleh pemerintah Desa Pattiroang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada (Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri Pasal 22) yang seharusnya 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- c. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- d. Teknologi tepat guna
- e. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- f. Pengembangan sosial budaya
- g. Dan sebagainya yang dianggap penting⁵⁴

Sementara data diatas menunjukkan penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat tidak mencapai 70%. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa dengan tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tersebut ini di karenakan oleh beberapa faktor: Pertama tingkat pendidikan, 95% aparat Desa Pattiroang hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat; kedua, di tahun 2017 Desa Pattiroang belum mempunyai pendamping desa; Ketiga, menurut penulis kurangnya sinergitas antara kepala desa dengan masyarakatnya.

⁵⁴Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 22.

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017

Pembahasan mengenai persepsi berbicara tentang pengetahuan dan pandangan masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pattiroang. Berikut adalah hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017

a. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Kebijakan ADD

Berdasarkan hasil penelitian sebagian masyarakat belum mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan ADD. Ditambah lagi tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Desa tentang pelaksanaan ADD tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Aziz salah seorang tokoh masyarakat Desa Pattiroang yang mengatakan bahwa

“Kami selaku masyarakat biasa tidak mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan ADD, ditambah lagi tidaknya adanya informasi yang sampai kepada kami selaku masyarakat biasa dari pihakpemerintah desa mengenai ADD tersebut. Tetapi saya pribadi sangat berharap, sekalipun kami tidak mengetahui apa itu ADD, semoga pemerintah dapat mempergunakan ADD itu untuk kepentingan rakyat”⁵⁵

Pernyataan ini senada dengan perkataan bapak Syamsuddin yang juga merupakan anggota masyarakat Desa Pattiroang yang menerangkan bahwa:

“Jika ada kegiatan pembangunan desa, pihak pemerintah tidak tidak memberikan informasi kepada masyarakatnya bahwa sumber pembangunan ini adalah sumbernya dari alokasi dana desa.”⁵⁶

⁵⁵Syamsuddin, Tokoh Masyarakat Desa Pattiroang, Wawancara, di Desa Pattiroang, 10 Desember 2017, Pukul 15.30 WITA

⁵⁶Aziz, Tokoh Masyarakat Desa Pattiroang, Wawancara, di Desa Pattiroang, 12Desember 2017, Pukul 09.30 WITA

Dari beberapa pernyataan informan diatas dapat diketahui bahwa sinergi antara pemerintah dengan masyarakat belum begitu baik tentang pelaksanaan ADD di Desa Pattiroang, walaupun pembangunan itu berjalan dengan baik. Akan tetapi menurut penulis sendiri jika suatu pembangunan yang tanpa adanya aspirasi masyarakat didalamnya karena kurangnya informasi dari pemerintah, hal ini belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Seharusnya pemerintah dengan masyarakat desa saling bersinergi dalam hal pembangunan desa begitupun dengan kegiatan lainnya. Apalagi dengan data yang ada yang pelaksanaan ADD di Desa Pattiroang belum sesuai dengan ketentuan yang ada dimana pelaksanaan ADD 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan 30% belanja aparatur dan operasional pemerintah.

b. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kebijakan ADD atau pelaksanaan kegiatan desa akan berjalan dengan baik apabila banyak dukungan dan atau banyak pihak yang terlibat didalamnya baik dari pihak pemerintah desa maupun dari masyarakat desa sendiri. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa informan, penulis dapat mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD tersebut. Bapak Syamsul Bahri yang juga merupakan salah satu kepala Dusun di Desa itu menjelaskan bahwa:

“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa di Desa Pattiroang masih sangat rendah, hal ini terjadi karena kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan desa. Menurut saya selama ini yang terlibat dalam kegiatan desa tersebut hanyalah orang-orang tertentu saja.”⁵⁷

Sedangkan menurut Ibu Hamsiah mengatakan bahwa:

“Saya selaku masyarakat Desa kurang mampu yang butuh pekerjaan dalam pembangunan proyek, seperti pembangunan jalan dan sebagainya

⁵⁷Syamsul Bahri, Kepala Dusun Malalia Desa Pattiroang, Wawancara, di Desa Pattiroang, 20 Desember, Pukul 13.00 WITA

berharap dipekerjakan oleh pihak Pemerintah sebagai buruh, namun pihak pemerintah hanya mempekerjakan orang-orang terdekatnya saja dan bahkan memasukkan pekerja dari luar desa Pattiroang.”⁵⁸

Berdasarkan dari penjelasan dari beberapa informan diatas penulis berpendapat bahwa kedepannya pemerintah harus memperbaiki sistem yang berlaku dari sebelumnya. Menurut penulis sendiri bahwa dalam pelaksanaan kegiatan desa seperti pembangunan jalan akan berjalan baik jika ada campur tangan dari masyarakatnya. Jika masyarakat Desa terlibat dalam pembangunan jalan, selain dia sebagai pekerja atau buruhnya, mereka juga berperan sebagai pengawas. Nah kenapa dikatakan masyarakat juga berperan sebagai pengawas? Karena, yang namanya masyarakat yang bermukim di Desa itu tentu mereka sangat mengharapkan kemajuan desanya.

Desa Pattiroang sebagai salah satu desa yang mempunyai APBDesa yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tahun 2017 yang berada di lingkup pemerintahan Kabupaten Bulukumba masih mengalami kendala terutama pengetahuan masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Alakosa Dana Desa (ADD). Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi atau informasi yang sampai kepada masyarakat mengenai ADD tersebut.

fokus pada penyelesaian seluruh proses pelaksanaan kebijakan ADD dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Tetapi pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diprakarsai dan diciptakan oleh masyarakat desa setempat.

D. Analisis Hasil Peneliti

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat

⁵⁸Hamsiah, Tokoh Masyarakat Desa Pattiroang, *Wawancara*, di Desa Pattiroang, 20 Desember Pukul, 19.00 WITA.

untuk diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian dalam pelaksanaan ADD juga diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. Dimana dalam permendagri tersebut Pasal 22 menegaskan bahwa 30% ADD diperuntukkan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian peneliti dapat mengeruakan hasil analisa dalam “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017”.

Dari hasil penelitian, berdasarkan keterangan dari beberapa informan dan data-data yang penulis kumpulkan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Pattiroang masih belum dikatakan efektif karena salah satu indikator keefektifan pelaksanaan ADD adalah adanya kesesuaian antara aturan dasar tentang pelaksanaan ADD dengan praktik yang terjadi di lapangan. Akan tetapi dari data yang didapatkan oleh peneliti, biaya untuk pemberdayaan masyarakat tidak mencapai 70% seperti apa yang ditegaskan dalam permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pelolaan keuangan desa. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah Desa belum maksimal dalam mengatur keuangan desa, karena pada tahun 2017 pemerintah desa Pattiroang belum mampu menciptakan yang namanya badan usaha milik desa (BUMDesa). Dimana kita ketahui bahwa BUMDesa adalah salah satu jenis usaha desa untuk menambah pemasukan keuangan desa yang nantinya akan diperuntukan kepada masyarakat desa.

Selanjutnya adalah mengenai persepsi masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD). Dalam hal ini tingkat pengetahuan masyarakat mengeai ADD masih sangat rendah hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap masyarakat mengenai ADD tersebut. Padahal

menurut peneliti dalam pelaksanaan ADD masyarakat harus berperang aktif. Masyarakat juga harus turut serta dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan ADD atau pengelolaan keuangan desa. Akibat dari rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap ADD sehingga tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan desa juga rendah. Sementara perencanaan pembangunan

desa yang diatur dalam pasal 80 UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musrembang Desa.⁵⁹ Musrembang tersebut menetapkan prioritas pembangunan desa, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa kedepannya. Akan tetapi hasil penelitian mengatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat Desa Pattiroang dalam kegiatan musrembang ditambah lagi kurangnya aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat sebagai sasaran kebijakan masih sangat rendah. Kemajuan suatu desa tidak hanya dilihat dari banyaknya anggaran yang masuk dan pembangunan fisik yang ada di desa tersebut namun yang perlu juga diperhatikan adalah pembangunan manusianya. Jika masyarakat desa paham tentang bagaimana peran mereka untuk memajukan sebuah desa maka ia pun senantiasa turut serta berpartisipasi dalam pembangunan desanya.

Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang kini menjadi salah satu tujuan sekaligus semangat UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang

⁵⁹Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 80.

terjadi di desa. Untuk itulah dalam proses pelaksanaan kebijakan ADD harusnya pemerintah desa tidak hanya sekedar fokus pada penyelesaian seluruh proses pelaksanaan kebijakan ADD dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Tetapi pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diprakarsai dan diciptakan oleh masyarakat desa setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017 secara umum sudah berjalan namun jika kita merujuk kepada ketentuan yang ada (Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), pelaksanaan kebijakan ADD tersebut belum dikatakan efektif karena seharusnya 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi biaya pemberdayaan masyarakat tersebut tidak mencapai 70% dari APBDesa.
2. Persepsi masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017. Dari beberapa responden yang sempat diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa pelaksanaan ADD belum sesuai apa yang diharapkan masyarakat karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta kurangnya sosialisasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

B. Implikasi Penelitian

Beberapa saran yang diharapkan agar kedepannya memperbaiki ataupun menyempurnakan tingkat pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Pattiroang

Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Pattiroang diharapkan memperbaiki sistem dalam proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dan menjadikan UU atau peraturan yang terkait sebagai landasan utama dalam pelaksanaan ADD.
2. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bersinergi dalam hal pelaksanaan ADD sehingga persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD tersebut tidak dinilai buruk. Kemudian partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam pelaksanaan ADD sehingga tercipta pembangunan yang sesuai harapan masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Ta'yudin. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Ali-Fauzi, Ihsan. *Bahasa Politik Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (CV Penerbit J-Art, 2004).
- Hamka. *Tafsir Al-azhar Juzu' 25* Surabaya: Penerbit Pustaka Islam.
- Handayani, Risma *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES, 1999.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakrta: PT. Gramedia, 1990.
- KolipUsman dan Elly M Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosia: Teori Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta : Pustaka Belajar, 2010).
- M. Arif SIP. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, RedPost, Pekanbaru-Riau, 2007.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.
- Nurdin, Ali *Quranic Society*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Ed.Revisi Ke 11.
- Shiddeqy, Ash dan Tengku Muhammad Hasbi. *Islam dan Politik*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

Shihab M. Quraish, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994).

Soeria Atmadja , Arifin P. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Ed. Ke-1.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2005.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2012.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit APIIBandung, 2003.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: Graha Ilmu, 2003.

Wibawa, Samudra. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia, 1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2017.

Dikutip dari “Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”

Skripsi dan Jurnal

Bahari Samsul, “Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna” (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2017)

Mahmudin, M. Ali. “Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa” (*Studi Pustaka* (KPM 403) Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2016).

Website

informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html diakses pada pukul 02.40 WITA Tanggal 10 September 2017.

lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/10/otonomi-menurutundang.undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/, diakses pada tanggal 23 September 2017 pada pukul 22.49 Wita.

makassar.tribunnews.com/2017/01/18/109-desa-di-bulukumba-dapat-dana-rp-1674-miliar, diakses pada tanggal, 23 September 2017 pada pukul 23.21 Wita



LAMPIRAN

Bersama Kepala Desa Pattiroang



Wawancara dengan Ibu Syamsiah, selaku tokoh masyarakat Desa Pattiroangng



Wawancara dengan bapak Syamsuddin selaku tokoh masyarakat Desa
Pattiroang



Wawancara dengan Bapak Aziz



Bersama dengan Bapak Syamsul Bahri selaku Kepala Dusun Malalia Desa
Pattiroang





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAT HIDUP



Penulis bernama **Arman** lahir di Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba pada tanggal, 05 Mei 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan buah kasih dari pasangan suami istri **Hamsin** dan **Sanang**. Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 2002 di SD Negeri 282 Tuboga Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah dimana penulis dilahirkan dan dibesarkan. Di sekolah tersebut penulis menimba ilmu selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kajang yang saat ini berubah nama menjadi SMP Negeri 21 Bulukumba dengan lama studi 3 tahun. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 13 Bulukumba dan selesai pada tahun 2014. Disekolah ini penulis aktif di beberapa organisasi seperti OSIS dan Pramuka. Dengan dukungan dari teman-teman serta dari pihak guru, Penulis diberikan amanah menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 13 Bulukumba periode 2012-2013.

Setelah penulis menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 13 Bulukumba pada tahun yang sama penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di kota Makassar yang memang menjadi keinginan penulis sendiri yakni di UIN Alauddin Makassar. Penulis mengambil Jurusan

Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum. Di PTN ini penulis juga pernah bernaung di beberapa organisasi ekstra seperti Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) Fakultas Syariah dan Hukum, Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) UIN Alauddin Makassar dan Ikatan Alumni SMA Negeri 13 Bulukumba (IKASMANTIB). Pada tahun 2018 Penulis dapat menyelesaikan studi dengan persyaratan karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul: **“Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pattiroang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Pada Tahun 2017”**.

Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lama studi tiga tahun sebelas bulan tiga belas hari pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Penulis berharap apa yang didapatnya berupa ilmu pengetahuan dapat penulis amalkan di dunia dan mendapat balasan Rahmat dari Allah SWT di kemudian hari, serta dapat membahagiakan orang tua yang selalu mendo'akan dan memberika dukungan terhadap penulis.